

SKRIPSI
“PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN TALAKA KECAMATAN
MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN”

Untuk Memenuhi
Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh :

ARSEL YARDEN
E051 191 077

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

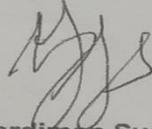
**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN TALAKA KECAMATAN
MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN**

Yang disusun dan diajukan oleh :

**ARSEL YARDEN
E051 191 077**

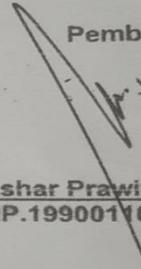
Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



**Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si
NIP.19680411 200012 1 001**

Pembimbing II



**Ashar Prawitno, S.IP, M.Si
NIP.19900110 201904 3 001**

Mengetahui

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**



**Dr. Andi Lukman Irwan, M. Si
NIP. 19790106 200501 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arsel Yarden
NIM : E051191077
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul :

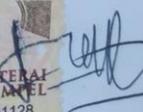
**“PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DI KELURAHAN TALAKA KECAMATAN
MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 November 2024

Yang membuat pernyataan


Arsel Yarden

KATA PENGANTAR

“Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku” (Filipi 4:13)

Shalom, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, penyertaan dan kasih setia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan fisik di Kelurahan Talaka kecamatan ma’rang Kabupaten Pangkajene&Kepulauan”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki, adapun kendala-kendala yang diluar kendali penulis yang beberapa kali terjadi selama penyusunan skripsi ini, namun Puji Tuhan karena kasih setia-Nya dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Lewat kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua Orang tua tercinta dan terkasih **Gerson Turu’ Allo** dan **Adolfina Mallo**. Terimakasih untuk segala doa, dukungan, pengorbanan dan kasih sayang yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Terimakasih juga kepada saudara-saudara penulis, **Alan risaldi** dan **Anggito Rayes** yang selalu ada untuk bertukar pikiran, mendukung, dan senantiasa menguatkan penulis serta yang memberi doa dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terimakasih juga kepada **Nenek Buntu** dan **Nenek Ani** kedua sosok yang selalu menginspirasi anak-anaknya sampai pada cucu-cucunya untuk terus menjalani hidup yang telah di karunikan Tuhan .Terima kasih karena selalu menasehati dan memberikan kasih sayang kepada penulis selama menjalani kehidupannya.

Serta untuk yang terkasih dan tersayang yang selalu menemani perjalanan penulis, **Monicha Datu Padang** yang menjadi *support system* terbaik bagi penulis yang selalu memperhatikan dan memberikan dukungan bagi penulis baik berupa tenaga, materi dan pikiran, tatkala penulis menemui kendala baik pada masa-masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Semoga selalu dalam kebaikan bersama orang terkasih. Tanpa cinta dan dukungan dari kalian semua, mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phil. Sukri, S.IP. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan dan jajarannya.
3. Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir ini (Skripsi).
4. Dr. Suhardiman Syamsu, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan arahan, saran, serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai bapak.
5. Ashar Prawitno, S. IP. M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak vii penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai dan memberikan arahan, saran, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai bapak
6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si,

(Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

8. Para staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam pelayanan administrasi untuk penyelesaian skripsi ini terkhusus Pak Mardi Terimah kasih atas bantuannya.
9. Seluruh staf tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam hal persuratan dan pelayanan administrasi.
10. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah menerima dengan baik serta memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam sesi wawancara dan pengumpulan data.
11. Kepada Lurah dan seluruh staf kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, Ketua dan jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Talaka terima kasih yang sebesar-

besarnya penulis haturkan atas bantuan dan kerja samanya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas atas ruang belajar selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
13. Ilmu Pemerintahan 2019. Terima kasih telah bersama-sama mengemban ilmu dalam lingkaran jurusan yang sama, semoga teman-teman *Government Science* sukses dan berkah ilmunya.
14. Seluruh Keluarga KEMA FISIP Unhas untuk ruang belajar selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
15. Teman-teman “Zeitgeist 2019” yang telah menjadi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan maupun berorganisasi terima kasih untuk kebersamaan dari awal kuliah sampai menyandang gelar sarjana. Untuk pengalaman, pelajaran hidup, bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga kita masih punya waktu untuk dapat bertemu kembali.
16. Teman -Teman “BTP Squad”, Marselinus, Grespan, Dimas terima kasih telah berbagi kebersamaan, memberi semangat, bantuan disegala urusan, serta menemani perjalanan penulis selama masa perkuliahan hingga sekarang, semoga kesuksesan senantiasa bersama kalian.

17. Teman -Teman Himapat, terima kasih telah berbagi kebersamaan, memberi semangat, bantuan disegala urusan, meskipun ada beberapa yang berbeda latar belakang kampus tetapi persaudaraan tetap menyatukan kita.
18. Teman-teman “MINLUV Berisik”, Pak Ruslin dan Bapak Site, yang menjadi kawan penulis selama KKN dan penelitian di Kelurahan Talaka, Terimah kasih atas kebaikan dan kebersamanya serta tumpangan rumahnya selama penulis berada di Talaka.
19. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Gel. 110 Posko Talaka. Terimah kasih atas kebersamaan dan kerjasama yang baik antar kita semua. Semoga di lain kesempatan dapat berjumpa kembali dengan cerita sukses masing-masing.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Terima Kasih.

Makassar 24 September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Peran.....	11
2.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	13
2.3 Pembangunan	18
2.3.1 Definisi Pembangunan.....	18
2.3.2 Macam – Macam Pembangunan	20
2.4 Peran LPM Dalam pembangunan.....	24
2.5 Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	31
2.5.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat	31
2.5.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	33

2.5 Kerangka Pikir	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan dan jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Fokus Penelitian	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Sumber Data Penelitian	44
3.6 Informan Penelitian.....	44
3.7 Teknik Analisis Data	45
BAB IV.....	47
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	47
4.1.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	48
4.1.1.2 Sejarah Singkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	49
4.1.1.3 Letak Geografis, Luas, Batas Wilayah Dan Topografi	52
4.1.1.4 Kondisi Demografi.....	57
4.1.2 Gambaran Kecamatan Ma'rang	62
4.1.2.1 Letak Geografis dan Administratif	62
4.1.2.2 Jumlah Penduduk	64
4.1.3 Gambaran Umum Kelurahan Talaka	65
4.1.3.1 Kondisi Geografis.....	65
4.1.3.2 Jumlah Penduduk	65
4.1.3.3 Tingkat Pendidikan	66
4.1.3.4 Mata Pencaharian.....	67

4.1.3.5 Sarana dan Prasarana Kelurahan	70
4.1.3.6 Visi dan Misi.....	71
4.1.3.7 Struktur Pemerintahan	71
4.1.3.8 Tugas pokok dan Fungsi Pegawai Kelurahan.....	73
4.1.4 Gambaran umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talaka.....	77
4.1.4.1 Struktur LPM Kelurahan Talaka	80
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	82
4.2.1 Peran LPM Kelurahan Talaka dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat terkait Pembangun Fisik	83
4.1.2 Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik	101
BAB V.....	138
KESIMPULAN DAN SARAN.....	138
5.1 Kesimpulan	138
5.2 Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Pangkep dan Jumlah Pulau	54
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Pangkajene dan Kepulauan	58
Tabel 4.3 Luas Kelurahan/Desa di Kecamatan Ma'rang	62
Tabel 4.4 Penduduk Kecamatan Ma'rang	63
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Talaka Berdasarkan Jenis Kelamin di Masing-Masing Lingkungan	65
Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Talaka	66
Tabel 4.7 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Talaka	67
Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana Kelurahan Talaka	69
Tabel 4.9 Kegiatan Hasil Pra-Musrenbang Kelurahan Talaka, 2024	90
Tabel 4.10 Usulan Musrenbang Kelurahan Talaka, 2024	95
Tabel 4.11 Kegiatan Prioritas Kelurahan Talaka, 2024	96
Tabel 4.12 Angka Partisipasi Masyarakat di Kegiatan Musrenbang Tahun 2022-2024	106
Tabel 4.13 Prioritas Pembangunan Fisik Kecamatan Ma'rang, 2023	109
Tabel 4.14 Daftar Hadir Musrenbang Kelurahan Talaka, 2024	110
Tabel 4.15 Sosialisasi LPM Terkait Perencanaan Program Pembangunan Fisik, 2024	114
Tabel 4.16 Evaluasi Pelaksanaan LPM Sebagai Mediator Oleh Pengurus LPM Talaka, 2023	117
Tabel 4.17 Rencana Strategi LPM Dalam Mengatasi	

Masalah di Kelurahan, 2024	118
Tabel 4.18 Rencana Metode Kegiatan LPM Talaka Sebagai Motivator Pembangunan, 2024	121
Tabel 4.19 Tindak Lanjut LPM Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, 2024	123
Tabel 4.20 Analisis Masalah Terkait Kendala Dalam Efektivitas Motivasi LPM	125
Tabel 4.21 Kegiatan LPM Kelurahan Talaka Sebagai Dinamisator Pembangunan, 2024	129
Tabel 4.22 Evaluasi yang Dilakukan Oleh LPM Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan	131
Tabel 4.23 Anggaran Terhadap LPM Kelurahan Talaka, 2023	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	
Skema Kerangka pikir Penelitian	36
Gambar 4.1 Peta Administrasi	
Kabupaten Pangkajene dan kepulauan	53
Gambar 4,2 Penduduk berdasarkan	
Jenis kelamin tiap kelompok umur	60
Gambar 4.3 Struktur Pemerintahan	
Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang	72
Gambar 4.4 Struktur Lembaga	
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talaka.....	81
Gambar 4.5 Alur LPM dalam	
Menampung dan menyalurkan	
Aspirasi masyarakat talaka	85

ABSTRAK

Arsel Yarden Nomor Induk Mahasiswa E051191077, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul: “ Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik Di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkajene & Kepulauan ”.(dibimbing oleh Dr.H.Suhardiman Syamsu,M.Si dan Ashar Prawitno, S.IP,M.Si).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Talaka,dengan melihat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu suatu pendekatan yang memberikan gambaran sosial secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang diperoleh di lapangan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kelurahan Talaka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini terlihat dari kurang berperannya pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dimana pihak LPM tidak menjadwalkan waktu yang tepat untuk mengadakan rapat bersama setiap kepala lingkungan, sehingga tidak efektifnya penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh setiap kepala lingkungan kepada LPM. Kedua, LPM juga belum berfungsi maksimal dalam menjembatani pemerintah dan masyarakat, dengan sosialisasi program yang terbatas dan minimnya akses informasi rencana pembangunan, sehingga peran dalam menjalankan fungsi masih minim dan belum dirasakan sepenuhnya oleh Masyarakat.

Kata Kunci : *Peran,LPM,Pembangunan Fisik,Kelurahan*

ABSTRACT

Arsel Yarden, Student Identification Number E051191077, Government Science Study Program, Department of Political Science and Government, Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Hasanuddin University, has prepared a thesis titled: "The Role of Community Empowerment Institutions (LPM) in Physical Development in Talaka Village, Ma'rang District, Pangkajene & Islands Regency" (supervised by Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si and Ashar Prawitno, S.IP, M.Si).

This research aims to understand the role of community institutions in development in Talaka Village by examining the role of LPM in accommodating and channeling community aspirations and implementing its functions to enhance community participation in development.

This study employs a qualitative approach, which provides a systematic, factual, and accurate social description of the data obtained in the field. Data collection was conducted using observation techniques, interviews, and literature studies.

The findings indicate that first, the role of LPM in Talaka Village in accommodating and channeling community aspirations is not yet optimal, as evidenced by the limited involvement of LPM in this process. The LPM has not scheduled appropriate times for meetings with each neighborhood head, leading to ineffective communication of aspirations from neighborhood heads to LPM. Second, LPM also does not function optimally as a bridge between the government and the community due to limited program socialization and minimal access to information regarding development plans, resulting in a diminished role that is not fully felt by the community.

Keywords: Role, LPM, Physical Development, Village

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya tujuan pembangunan suatu Negara dilaksanakan untuk mensejahterakan masyarakat, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa tujuan pembangunan Nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan Nasional, yaitu pembangunan negara Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Pendapat Yamin dan Haryanto dalam Afandi (2022:3) pembangunan merupakan suatu proses transformasi masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana yang ada dalam konstitusi. Dalam proses transformasi tersebut, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan yakni keberlanjutan dan perubahan. Pembangunan juga merupakan proses yang bergulir dari waktu ke waktu sehingga tidak pernah berhenti.

Pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap

masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dalam kehidupan. Demi tercapainya tujuan pemerataan pembangunan di Indonesia, Pemerintah pusat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah.

Otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan prinsip otonomi secara keseluruhan dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah juga berarti bahwa daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan kebijakan atau program pembangunan yang sesuai dengan permasalahan pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing. Pembangunan daerah

merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Menurut Hendrawati Hamid (2021 :8) Salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan di wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat. Adanya suatu pembangunan di wilayah tertentu berarti adanya usaha pemerintah untuk menuju kearah perbaikan secara bertahap dan berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus secara komperhensif, baik itu secara fisik maupun pembangunan dari sumber daya manusianya.

Perubahan cara pandang terhadap pemerintahan dari *“government”* ke *“governance”* membawa dampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pola pelayanan publik. Jika selama ini pemerintah yang banyak mengambil prakarsa dalam urusan pelayanan publik dan pemerintahan, maka dengan pola baru ini prakarsa itu bertumpu pada tiga pilar utama, yakni : pemerintah, pihak swasta (kelompok peduli) dan masyarakat. Dalam konsep *governance*, peran pemerintah yang tadinya menjadi aktor utama dalam pembangunan dan penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi pendorong terciptanya lingkungan yang

mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan pihak swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, seperti: perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang. Kebijakan pemberdayaan masyarakat juga tertuang didalam ketentuan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan objek yang diberdayakan.

Saat ini pemberdayaan masyarakat mulai dijadikan program yang wajib untuk diadakan karena masyarakat yang belum memiliki kemampuan dan belum berdaya harus segera dibenahi agar lebih berdaya dengan dibantu oleh seseorang atau lembaga/kelompok pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam sebuah masyarakat adalah hal yang harus dilakukan karena masyarakat harus mengalami perkembangan dan perbaikan bagi kelangsungan hidup mereka.

Salah satu cara atau upaya untuk meningkatkan lembaga kemasyarakatan yaitu lewat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang secara organisasi merupakan wadah penyaluran

aspirasi dan partisipasi masyarakat, dalam fungsinya lembaga ini telah membantu pemerintah kelurahan pada perencanaan pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat serta menjadi fasilitator dalam menyalurkan aspirasi, sedangkan pemerintah kelurahan memiliki peranan dan membina hubungan kerjasama yang baik. Hubungan kerjasama antara pemerintah kelurahan dengan kelembagaan yang ada haruslah bersifat saling mengisi, tanpa adanya intervensi dari masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 10 Tentang Lembaga Kemasyarakatan, menyatakan bahwa kelurahan dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. tugas lembaga kemasyarakatan adalah menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk membina dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat sebagai bagian dari penguatan negara kesatuan republik Indonesia, pelayanan pemerintah yang bermutu dan dipercepat kepada masyarakat, perencana, pelaksana dan pemelihara, pengembangan dan pemanfaatan hasil pembangunan, konservasi dan pembangunan secara partisipatif, percepatan pertumbuhan dan prakarsa, serta partisipasi masyarakat dan swadaya serta kegiatan lainnya. Kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam berpartisipasi maka dari itu setiap pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat harus mampu

memahami hal tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salain dari pada itu pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat juga harus massif dalam melakukan sosialisasi atau rapat rutin guna untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan beberapa fenomena yang menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan terlihat belum mengetahui fungsi dari peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, belum bisa mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap perencanaan pembangunan fisik, dari segi perawatan yang dilakukan masih kurang perhatian masyarakat sendiri sehingga pembangunan yang dilakukan hanya digunakan untuk asas manfaatnya saja. Padahal selain LPM dan pemerintah yang merawat hasil dari perencanaan pembangunan, masyarakat pun harus ikut andil dalam hal tersebut, jadi motivasi yang seharusnya di lakukan LPM untuk menyadari masyarakat belum terlihat optimal. Disamping itu, belum adanya upaya LPM dalam menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Kelurahan Talaka. Sehingga sangat diperlukan bantuan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra pemerintah Kelurahan dan juga wadah untuk menggerakkan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan fisik.

Walupun LPM sudah ada di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Talaka, tetapi masih terdapat kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah Kelurahan terkadang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya program pembangunan yang masuk ke Kelurahan. kenyataanya hanya mampu menjadikan masyarakat sebagai penerima pasif tanpa ada keterlibatan secara aktif atau lebih dikenal dengan pembangunan yang bersifat *top down*. Melalui penjelasan latar belakang dan Fenomena yang diungkapkan maka peneliti tertarik untuk mengetahui **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan fisik Di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkajene & Kepulauan”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas rumusan masalah untuk ditemukan dan dijawab pertanyaan selama penelitian berlangsung, yaitu

1. Bagaimana peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik di kelurahan Talaka kecamatan Ma’rang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan fisik di kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik di kelurahan Talaka kecamatan Ma'rang kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan serta menambah referensi perpustakaan dan sumber bacaan di lingkungan FISIP UNHAS khususnya pada Departemen Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan kemajuan ilmu, khususnya kajian ilmu pemerintahan yang berkaitan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan

3. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian menjadi bahan informasi maupun referensi bagi pemerintah dan masyarakat mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan disebut dengan peran. Peran (*role*) merupakan realisasi dari seperangkat hak dan kewajiban yang memberikan suatu kontribusi tertentu sesuai dengan bidang yang ditekuni untuk mencapai suatu tujuan. Apabila seseorang atau instansi tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka seseorang atau instansi itu menjalankan peran. Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Tepatnya peranan merupakan fungsi seseorang atau instansi dalam mencapai sesuatu.

Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah sebagai berikut :

- a. Peran adalah pemain yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial. Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto (2009:212) dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam

kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, penjabat, dan lain sebagainya

- b. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri
- c. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi yang lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu yang menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Talaka peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang yang dimiliki seperti perannya dalam pembangunan di Kelurahan Talaka.

2.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga ini berkedudukan di kelurahan dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dimana pengurusannya terdiri dari komunitas masyarakat, dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau sering disingkat dengan (LPMK) merupakan lembaga pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau yang dikenal dengan LKMD, Lembaga Pemberayaan Masyarakat Kelurahan menurut pasal 1 point(13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan adalah “lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan dalam hal ini Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat melalui musyawarah dan mufakat, bukan prakarsa atau keinginan dari pemerintah atau Lurah, dan keberadaan LPMK ini juga dijadikan sebagai mitra kerja Lurah dalam menampung dan mewujudkan berbagai aspirasi serta kebutuhan dari masyarakat setempat khususnya aspirasi dan

keinginan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kelurahan.(Rahmawati 2020)

Penyusunan rencana program kelurahan dilakukan pegawai kelurahan bekerjasama dengan LPM, dengan kata lain LPM pun berhak untuk mengajukan saran saran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, bahkan sebuah keputusan kelurahan harus disahkan pula oleh LPM Keberhasilan pembangunan di kelurahan yang melibatkan LPM memerlukan dukungan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pem bangunan yang ada di kelurahannya sepenuhnya dari seluruh pengurus LPM dalam menggali dan LPM merupakan wakil-wakil rakyat yang ada di kelurahan, berarti setiap anggota LPM mewakili tiap-tiap unsur dan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, setiap anggota LPM harus mampu melakukan komunikasi yang efektif dan lancar dengan rakyat yang diwakilinya sehingga mereka mengetahui dan memahami seluruh aspirasi masyarakat. Sebaliknya masyarakat pun tidak boleh segan-segan untuk mengemukakan semua aspirasi dan kebutuhannya kepada setiap anggota LPM. Aspirasi yang diajukan oleh masyarakat harus dipertimbangkan sematang-matangnya oleh LPM dan melakukan penilaian mengenai aspek-aspek manakah dari aspirasi masyarakat tersebut yang dapat diprioritaskan untuk diperjuangkan

menjadi keputusan kelurahan yang akan ditetapkan sebagai program pembangunan kelurahan

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Lembaga LPM juga diberikan berbagai bentuk kewajiban, diantaranya; membantu pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dan peraturan perundangundangan yang berlaku, ikut membantu menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai bentuk kerjasama, seperti dengan pemerintah dan swasta membantu menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, seperti juga membantu Lurah dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, sebagai mediator penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta mampu menggali pontensi sumber-sumber pembiayaan untuk mencapai kemandirian tanpa bergantung kepada pemerintah. Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

dipilih secara demokratis pada masing-masing tingkatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan utusan dari masing-masing RW dengan persetujuan oleh Ketua RT dan Ketua RW. Pada umumnya, calon dari pengurus ini adalah para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh, partisipasi yang baik, dan kepedulian yang tinggi diantara warganya yang diminta kesediaan menjadi pengurus

2.3 Pembangunan

2.3.1 Definisi Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses transformasi masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan sebagaimana yang ada dalam konstitusi. Beberapa pengertian pembangunan yang diajukan oleh para ahli sebagai berikut

- a. Nugroho dan Dahuri (2004) menyatakan pembangunan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.
- b. Siagian (2003) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar

oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

- c. Listyaningsih (2014) memberi arti pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju arah yang lebih baik.
- d. Supardi (1994) menyatakan pembangunan adalah proses sosial yang bersifat integral dan menyeluruh, baik berupa pertumbuhan ekonomi maupun perubahan sosial demi terwujudnya masyarakat yang lebih makmur.
- e. Kartasasmita (1996) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana

Dengan demikian pembangunan merupakan proses sejarah, sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu sehingga tidak akan pernah berhenti. Pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, melainkan juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Jamaluddin dalam (Affandi 2022:2) Pembangunan harus mampu membawa manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dalam kehidupan

Pembangunan akan berhasil apabila masyarakatnya bisa hidup sejahtera. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan adalah

proses perubahan terencana yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan baik pada level makro (nasional), maupun mikro (kelompok masyarakat). Dengan pembangunan diharapkan ada pertumbuhan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

2.3.2 Macam – Macam Pembangunan

Berbicara terkait pembangunan perlu kita tahu tentang dua hal yang berkaitan dengan pembangunan tersebut yaitu pembangunan fisik maupun nonfisik. Rangga (2011: 1) menyebut pembangunan dapat dilakukan secara fisik maupun nonfisik. Tujuan utama pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Dapat pula dikatakan pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat. Oleh karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan nonfisik perlu disinergikan agar tujuan utama pembangunan dapat tercapai.

Sejalan itu, pada prinsipnya pembangunan fisik mesti sejalan dengan pembangunan nonfisik. Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, gedung misalnya, tidak akan berhasil dikembangkan apabila tidak ada sumber daya manusia yang bisa mendukung

pembangunannya. Artinya, ketika berbicara soal pembangunan jalan raya diperlukan sumberdaya manusia yang menguasai terkait pembuatan jalan raya. Hal itu berlaku juga, misalnya untuk pembangunan jembatan dan gedung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan fisik tak bisa berjalan sendiri tanpa didukung dengan pembangunan nonfisik

Definisi Pembangunan Fisik Dan Pembangunan Non Fisik Di Dalam Kehidupan Masyarakat dikemukakan menurut B.S Muljana (2001:3) :

1. Pembangunan Fisik

dalam istilah pembangunan meliputi sarana dan juga prasarana pemerintahan seperti:

- a. Jalan
- b. Jembatan
- c. Pasar
- d. Pertanian
- e. Irigrasi.

Kondisi fisik ini dapat berupa letak geografis, dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah kelurahan sangat menentukan sekali percepatan didalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan

suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri.

Menurut B.S Muljana (2001:3) pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Sumber daya alam yang terdapat dimasing-masing desa. Dimana sebuah desa yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang banyak dari pada desa-desa lainnya, sehingga untuk mengembangkan atau dalam proses pembangunan desa akan jauh lebih baik dari pada desa yang sedikit mempunyai sumber daya alam, atau tidak ada sama sekali.

2. Pembangunan non fisik

Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar effendi (2002:114). Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun non fisiknya Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu :

a. Pembangunan manusia

- b. Ekonomi
- c. Kesehatan
- d. Pendidikan.

Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun pembangunan antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik mengedepankan sumberdaya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik.

Pembangunan tersebut haruslah bersinergi satu sama lain, Pembangunan non fisik dilakukan guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, baik peningkatan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat bidang kesehatan maupun kesejahteraan dalam bidang lainnya.

Kondisi non fisik terdiri dari atas aspek-aspek sosial budaya politik, dan religi. Aspek sosial budaya dalam arti sempit merupakan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang masih ditaati. Misalnya kegiatan gotong royong, yang merupakan kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling berpengertian, Oleh karena itu peran

manusia dalam pembangunan nonfisik perlu diperhatikan. Usaha dibidang pembangunan non fisik dapat dijalankan dengan cara membimbing, cara persuasi melalui telinga dan mata (audio dan visual), dan dapat dengan cara memberi stimulasi dari pihak terkait ke masyarakat.

2.4 Peran LPM Dalam pembangunan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotong royong masyarakat desa. Pembangunan merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di Kelurahan dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat Muhtarom (2016 : 5)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja Pemerintahan adalah Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat kelurahan. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Menggali serta memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam hal ini juga berperan sebagai media komunikasi antara masyarakat dengan

pemerintah dan antar masyarakat itu sendiri, memberdayakan dan menggerakkan potensi pemuda dalam pembangunan, mendorong mendirikan dan memberdayakan peranan wanita dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga, membangun kerjasama antar lembaga yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat

Dalam hal ini, di setiap penyusunan rencana pembangunan desa atau pekon diperlukannya sinergisitas atau kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan kepala pekon, dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan yang dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh kelurahan tersebut yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Peran lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah kelurahan (Juliana 2014:25)

a. Sebagai Fasilitator

Menurut Hulu (2020:3) Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Peranan LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat dengan menampung aspirasi masyarakat dalam proses melakukan kegiatan perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan: Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;

- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
 - d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
 - e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.
-
- a) Masyarakat ikut dalam proses merencanakan suatu pembangunan di desa
 - b) Masyarakat ikut serta dalam menentukan prioritas usulan program pembangunan

Peran LPM sebagai fasilitator di Kelurahan adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program

pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di Kelurahan.

Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kelurahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator harus dengan sabar melakukan usaha meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif. (Juliana 2014:27)

b. Sebagai Mediator

Peran pengurus LPM sebagai mediator pada hakikatnya merupakan mensosialisasikan hasil-hasil usulan atau rancangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini termasuk di dalamnya sosialisasi kegiatan seperti pihak-pihak yang diakan diminta partisipasi dan keterlibatannya.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam hal ini adalah menyediakan ruang dan mempersiapkan usulan pertemuan dengan berbagai pihak. seperti musyawarah bersama terkait perancangan program, pengurus LPM terlebih dahulu mengusulkan

kepada pihak kelurahan. Apabila usulan tersebut disetujui maka selanjutnya pengurus LPM akan mempersiapkan baik ruangan maupun persiapan pertemuan seperti undangan rapat yang disampaikan kepada para peserta rapat Pitaloka (2021:29)

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM di Kelurahan mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga Kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat.

c. Sebagai Motivator

Motivator merupakan orang atau kelompok yang mampu membuatkan orang lain untuk bisa melakukan sesuatu (Winata 2016:10). Didalam LPM sangat dibutuhkan motivator yang bisa mendorong masyarakat yang ada di Kelurahan untuk bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang sesuai keinginan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menempatkan diri sebagai motivator yaitu memotivasi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya, membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya, membantu mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah, meyakinkan pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan, peka terhadap kebutuhan masyarakat melakukan pertemuan atau musyawarah, dan membantu kelompok masyarakat memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan

Seperti yang dikemukakan Pitaloka (2021:29) LPM sebagai motivator ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat dan menjembatani atau menampung aspirasi masyarakat, terlebih dalam hal pembangunan untuk kemajuan Kelurahan, serta LPM dapat menjadi motivasi atau sambung tangan dari aspirasi masyarakat kepada aparat pemerintah. Dengan adanya fungsi ini peran LPM di Kelurahan akan berperan dengan baik dan pembangunan di Kelurahan akan berkembang

d. Sebagai Dinamisator

Menurut Pendapat Juliana (2014 :15) Kata dinamisator berasal dari kata dinamis yang berarti merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang berarti. Sedangkan dinamisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menimbulkan

atau menjadikan sesuatu menjadi terus bergerak atau berubah (dinamika).

Pihak LPM harus cermat dan bijaksana dalam mengawasi dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu berubah, dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. LPM dituntut untuk jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah dia berdomisili. Hal yang dapat dilakukan LPM untuk terus melakukan pergerakan dan perubahan ke arah pembangunan yang lebih baik dapat di lihat dari:

- a. LPM melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan.
- b. melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah terlaksana

2.5 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

2.5.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses

untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan ini sangatlah penting sebagai proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Seperti yang dikemukakan Mardikanto dan Soebiato (2012:61) pemberdayaan sebagai sebuah proses yang merujuk pada kemampuan untuk berpartisipasi, memperoleh kesempatan dan mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas hidup (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti yang luas). Melalui pemahaman tersebut, pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terencana untuk meningkatkan taraf hidup yang diberdayakan.

Menurut Suharto (2010: 58), pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas

mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.

- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka

Jadi kesimpulannya, pengertian pemberdayaan masyarakat adalah proses pemberian daya atau kekuatan (*power*) terhadap perilaku dan potensi individu atau masyarakat, serta pengorganisasian kelompok masyarakat oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri atas dasar partisipasi. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat memiliki inisiatif untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitarnya agar dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta kondisi diri sendiri menjadi lebih baik.

2.5.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagai suatu kegiatan yang berproses, maka seharusnya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam

memenuhi kebutuhan hidup yang utama, dan pada akhirnya Pemberdayaan Masyarakat akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat.

Menurut Mardikanto (2013: 109), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan Usaha (*better business*). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan Pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- d. Perbaikan Lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

- e. Perbaiki Kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula

Menurut Affandi (2019:5) terwujudnya kemandirian masyarakat merupakan tujuan utama dari program pemberdayaan. Dengan pembahasan secara bersama, masyarakat dapat termotivasi dan terlibat aktif dalam seluruh tahapan kegiatan. Selain itu masyarakat dapat merasakan program yang dilaksanakan bertujuan untuk mengangkat kualitas hidup mereka, mempunyai kemampuan untuk mengelola kegiatan secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada siapapun, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dan dapat memperbaiki segala aspek, dalam arti memiliki potensi agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah.

2.5 Kerangka Pikir

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian yang akan dilakukan, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut :

Pada lembaga kemasyarakatan yaitu LPM memiliki peran yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan yang akan ditelusuri dengan menggunakan indikator fasilitator, mediator, motivator dan dinamisator berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peran LPM dalam pembangunan fisik di Kelurahan talaka.

Alat ukur sebagaimana dikemukakan diatas diharapkan dapat mengukur permasalahan yang terjadi dilapangan sesuai dengan fokus permasalahan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti menggambarkan model penelitian sebagai berikut

Gambar 2.1
Skema Kerangka pikir Penelitian

